

BAB I

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, membawa konsekuensi terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan, seiring berubahnya kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah secara efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan tentunya dengan penerapan model otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk lebih kreatif dalam berinovasi dan bekerja secara lebih baik dan maju, mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Clean dan Good Governance*).

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penyampaian LKPJ Bupati Tegal adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan “Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah

dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.

Materi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipaparkan dalam LKPJ ini meliputi :

- a) arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
- b) pengelolaan keuangan daerah;
- c) penyelenggaraan urusan desentralisasi;
- d) penyelenggaraan tugas pembantuan;
- e) penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pada pasal 71 ayat (3) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyampaian LKPJ ini merupakan satu wujud akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah atas amanat yang diberikan masyarakat sekaligus sebagai wujud pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan. Esensi dari penyampaian LKPJ ini adalah Kepala Daerah menyampaikan deskripsi kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun, yang hasilnya menjadi landasan bagi upaya perbaikan dan koreksi agar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang bisa lebih optimal.

Penyusunan dan penyampaian LKPJ ini adalah untuk menyampaikan gambaran secara transparan tentang pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Karenanya, perlu disadari bersama bahwa berbagai keberhasilan yang telah dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, baik Pemerintah, DPRD maupun seluruh komponen masyarakat. Sementara yang belum berhasil kita laksanakan, hendaknya dilihat sebagai sebuah tantangan untuk kita wujudkan bersama-sama di masa yang akan datang.

1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020.

1.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEGAL

1.2.1 Gambaran Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Tegal terletak antara garis 6° 50' 41" - 7° 15' 03" Lintang Selatan dan garis 108° 57' 06" - 109° 21' 30" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Tegal terdiri atas 18 wilayah kecamatan dengan 281 Desa dan 6 Kelurahan, dengan luas wilayah adalah 878,79km², dengan batas-batas administratif adalah:

Sebelah Utara	: Laut Jawa dan Kota Tegal
Sebelah Selatan	: Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
Sebelah Barat	: Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
Sebelah Timur	: Kabupaten Pemalang

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal Tahun 2019

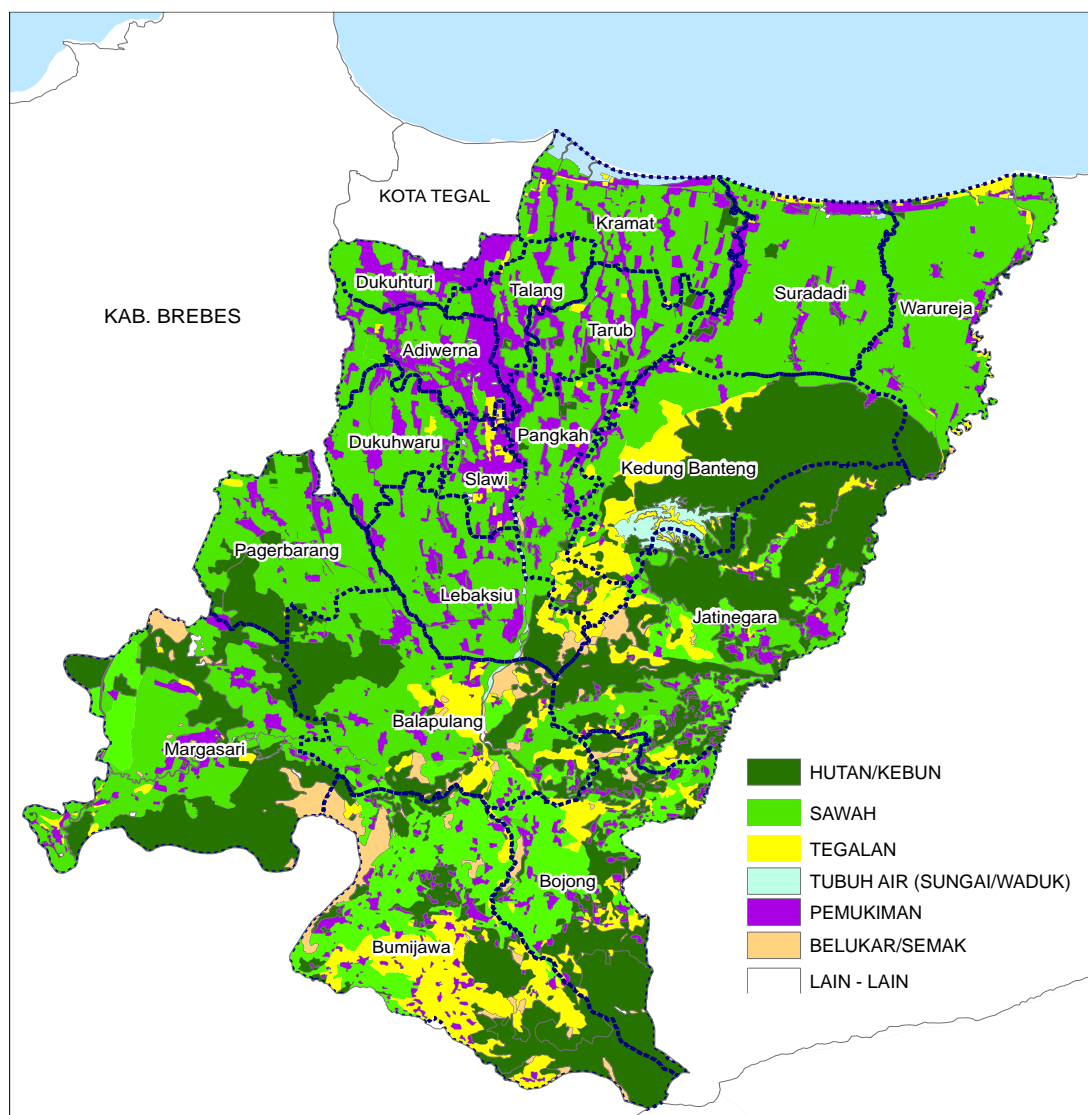
Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
01. Margasari	86,83	13
02. Bumijawa	88,55	18
03. Bojong	58,52	17
04. Balapulang	74,91	20
05. Pagerbarang	43,00	13
06. Lebaksiu	40,95	15
07. Jatinegara	79,62	17
08. Kedungbanteng	87,62	10
09. Pangkah	35,51	23
10. Slawi	13,63	10 (5 desa, 5 kelurahan)
11. Dukuhwaru	26,58	10
12. Adiwerna	23,86	21
13. Dukuhturi	17,48	18
14. Talang	18,39	19
15. Tarub	26,82	20

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
16. Kramat	38,49	20 (19 desa, 1 kelurahan)
17. Suradadi	55,73	11
18. Warureja	62,31	12
Jumlah	878,79	281 desa / 6 kelurahan

Sumber: Bappeda Dan Litbang Kabupaten Tegal, 2019

Secara topografi, Kabupaten Tegal memiliki keunikan karena terdiri dari daerah pantai dan daerah perbukitan, dengan elevasi topografi berada pada ketinggian antara 250 m sampai sekitar 1.300 m diatas permukaan laut. Secara umum, Kabupaten Tegal didominasi oleh dataran rendah khususnya pada bagian utaranya dan perbukitan di bagian selatannya. Sama halnya dengan kenampakan morfologi Pulau Jawa, semakin mengarah ke selatan, morfologi Kabupaten Tegal cenderung berupa area perbukitan. Wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 katagori daerah, yaitu (1) daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja; (2) daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah; dan (3) daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng. Kemiringan tanah di Kabupaten Tegal bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Bila ditinjau ketinggiannya terhadap permukaan laut, secara garis besar wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran rendah, kawasan dengan ketinggian 250-500 m dpl, kawasan dengan ketinggian 500-750 m dpl, dan kawasan dengan ketinggian di atas 750 m dpl. Ditinjau dari aspek morfologi, wilayah Kabupaten Tegal terbagi atas daerah dataran rendah, daerah perbukitan landai, daerah perbukitan bergelombang, dan daerah perbukitan terjal. Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah Kabupaten Tegal terdiri atas tanah aluvial, litosol, regosol, dan grumosol. Sedangkan berdasarkan iklim, Kabupaten Tegal beriklim tropis dengan dua musim bergantian sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan September. Kelembaban udara rata-rata berkisar

78 persen; tertinggi pada bulan Februari dan terendah pada bulan September. Penggunaan lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh area non terbangun. Lahan sawah dapat ditemui di daerah Utara kabupaten yang relatif datar; sementara daerah Selatan yang relatif berbukit didominasi oleh hutan. Dua jalur regional utama (pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto) menjadi generator utama pertumbuhan wilayah. Kawasan terbangun tumbuh seturut kedua jaringan jalan tersebut, sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini.

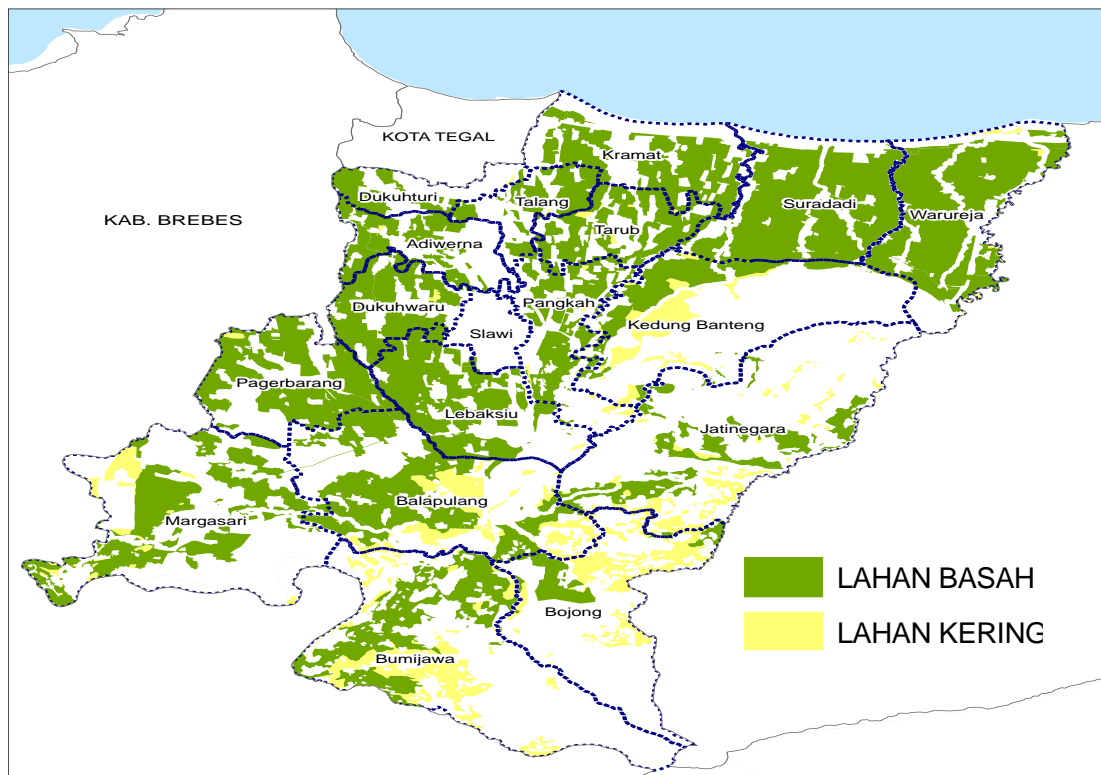


Gambar 1.1 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tegal

Sumber: RTRW Kabupaten Tegal 2012-2032

Luasan lahan sawah terus mengalami penurunan, sedangkan luasan permukiman mengalami kenaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat kecenderungan yang terjadi adalah maraknya konversi dari lahan pertanian subur beririgasi teknis menjadi lahan permukiman. Jika hal ini terjadi pada daerah hulu dan menutup

saluran irigasi, maka sawah pada daerah hilir akan otomatis mati. Dengan adanya kebijakan lahan sawah berkelanjutan dan prioritas untuk menguatkan ketahanan pangan, isu konversi lahan ini sepatutnya menjadi hal yang diprioritaskan penanganannya. Adapun gambaran sebaran lahan pertanian Kabupaten Tegal sebagaimana Gambar 1.2 berikut ini.



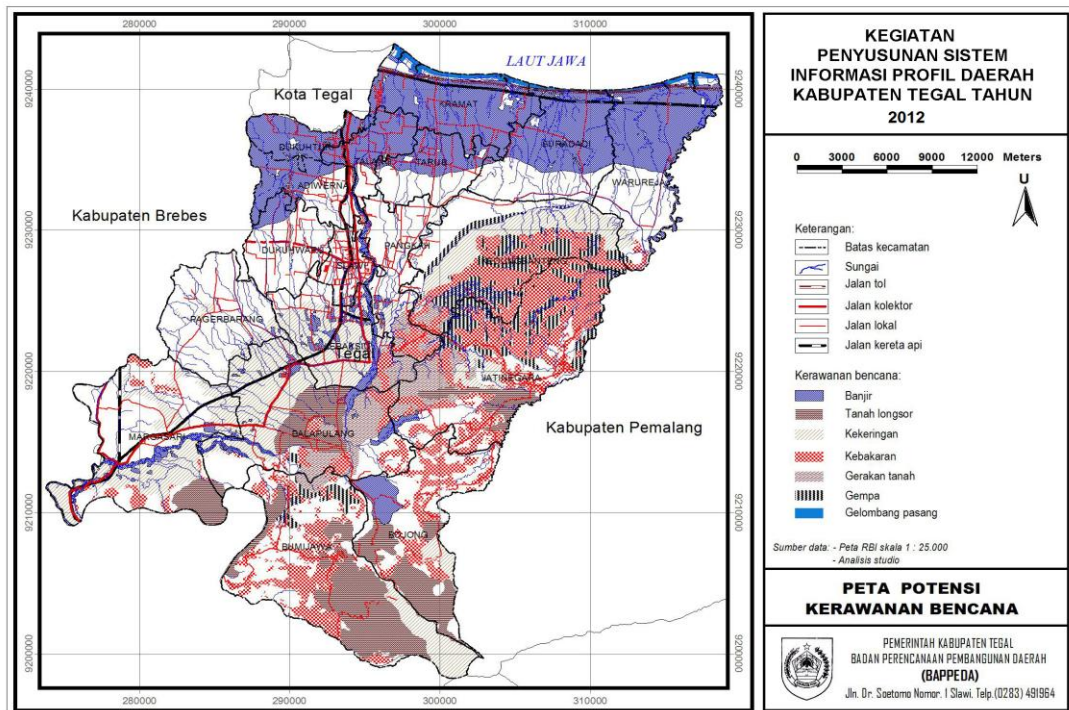
Gambar 1.2 Lahan Pertanian

Sumber: RTRW Kabupaten Tegal 2012-2032

Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012–2032 yaitu:

- 1.1 Kawasan Pertanian Lahan Basah : 35.946 Hektar
- 1.2 Kawasan Pertanian Lahan Kering : 6.630 Hektar

Dengan morfologi wilayahnya yang terdiri atas: wilayah datar/landai, perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan bervariasi antara tipe datar 0-2⁰ tipe bergelombang 2 -15⁰, tipe curam/berbukit 15 - 40⁰ dan tipe sangat curam >40⁰ Kondisi alam tersebut, membuat Kabupaten Tegal rentan dengan bencana alam, baik itu bencana banjir, bencana longsor, bencana erosi dan lain sebagainya, yang bisa dilihat dari Gambar 1.3 di bawah ini.



Gambar 1.3 Peta Potensi Kerawanan Bencana Kabupaten Tegal
Sumber: SIPD Kabupaten Tegal

1.2.3 Kerawanan Bencana Alam Tanah Longsor

Jenis tanah dengan karakteristik dan sifat dengan angka pelapukan batuan yang sangat tinggi dengan komposisi tanah didominasi material lepas dan berlapis, maka tanah mudah longsor. Kerawanan bencana alam tanah longsor dengan tingkat kerawanan tinggi di Kabupaten Tegal seluas 15.011, 29 ha (15,30%) terinci atas Kecamatan Balapulang (3.601,34 ha), Bojong (1.864,83 ha), Bumijawa (3.841,03 ha), Jatinegara (2.258,77 ha), Kedungbanteng Desa Penujah (393,73 ha), Lebaksiu (1.192,78 ha), Margasari (726,68 ha) dan Pangkah (1.132,13 ha).

1.2.4 Kerawanan Bencana Banjir

Faktor-faktor yang mempengaruhi bencana banjir adalah kondisi bentuk lahan fisiografis, topografi, curah hujan, bentuk morfometri DAS dan kondisi drainase kawasan Kerawanan Bencana Banjir di Kabupaten Tegal dengan tingkat kerawanan tinggi seluas 20.794,86 ha (21,19%) terinci atas Kecamatan Adiwerna (1.405,93 ha), Balapulang (637,80 ha), Bojong (625,22 ha), Bumijawa Desa Sokasari (5,13 ha), Dukuhturi (1.674,93 ha), Dukuhwaru (370,53 ha), Jatinegara Desa Kedungwungu (92,94 ha), Kramat (4.015,17 ha), Lebaksiu (668,88 ha),

Margasari (1.069,89 ha), Pangkah (234,54 ha), Slawi (110,13 ha), Suradadi (3.326,91 ha), Talang (1.589, 07 ha), Tarub (1.469,16 ha) dan Warureja (3.498,65 ha).

1.2.5 Kerawanan Bencana Gempa Bumi

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bencana gempa bumi adalah kekuatan gempa (*strength/energy*), jarak terhadap pusat gempa (*Distance to Epicenter*), kerapatan patahan/*sesar* dan kondisi geologis wilayah. Tingkat bencana gempa bumi di Kabupaten Tegal paling tinggi pada tingkat kerawanan “sedang” yaitu seluas 15.204,43 ha (15,49%) terinci atas Kecamatan Adiwerna (2.184,01 ha), Balapulang (2.690,60 ha), Bojong (6.337, 94 ha), Bumijawa (9.364,63 ha), Dukuhhuri (1.674,92 ha), Dukuhwaru (952,29 ha), Jatinegara (4.123,41 ha), Kedungbanteng (13.873, 93 ha), Margasari (425,35 ha), Pangkah (843,99 ha), Suradadi (5.388,83 ha), Talang (1.884,55 ha), Tarub (2.782,30 ha) dan Warureja (6.218,52 ha).

1.2.6 Kerawanan Bencana Gelombang Pasang

Gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang dan perubahan cuaca secara cepat. Hal ini memicu terjadinya arus laut yang kuat dan menghempaskan air ke pantai sehingga timbul gelombang pasang utamanya daerah morfologi datar. Kerawanan bencana gelombang pasang di Kabupaten Tegal dengan kerawanan bencana gelombang pasang “tingkat tinggi” seluas 130,87 ha (0,13%) utamanya pada 3 daerah di wilayah pantura yaitu Kecamatan Kramat (desa Kramat dan Maribaya) seluas 25,71 ha, Kecamatan Suradadi (desa Suradadi, Purwahamba dan Bojongsana) seluas 70,87 ha dan Kecamatan Warureja desa Demangharja seluas 34,29 ha.

1.2.7 Kerawanan Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Tegal dengan tingkat kerawanan tertinggi ada pada 10 kecamatan seluas 7.697,18 ha, terinci atas Kecamatan Balapulang 161,18 ha, Bojong 391,32 ha, Bumijawa desa guci 1.187,66 ha, Jatinegara 439,65 ha, Kedungbanteng 2.113,75 ha, Lebaksiu 95,52 ha, Margasari 2.611,58 ha, Pagerbarang 117,74 ha,

Pangkah 435,40 ha dan Kecamatan Warureja desa Karangjati seluas 143,64 ha.

1.2.8 Kerawanan Bencana Alam Kebakaran Lahan

Terjadinya kebakaran lahan/hutan umumnya cenderung disebabkan oleh kesalahan manusia (*human errors*), seperti penebangan hutan secara liar, pembakaran semak belukar serta berbagai upaya hidup yang mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Tingkat kerawanan bencana alam kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Tegal dalam kategori tinggi seluas 19.547,87 ha (19,92%) tersebar pada 9 kecamatan, yaitu Balapulang 1.486,65 ha, Bojong 2.815,64 ha, Bumijawa 4.059,98 ha, Jatinegara 5.285,94 ha, Kedungbanteng 3.687,66 ha, Lebaksiu 247,15 ha, Margasari 1.330,76 ha, Pangkah desa Dermasuci dan Dukuhjati Kidul 446,43 ha dan Kecamatan Warureja desa Kedungjati 187,67 ha.

1.3 GAMBARAN DAN DEMOGRAFI

Secara demografi, berdasarkan data sangat sementara yang diperoleh menggunakan metode penghitungan dari BPS, jumlah penduduk Kabupaten Tegal di tahun 2019 sejumlah 1.440.698 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 715.904 jiwa (49,69%) dan penduduk perempuan sejumlah 724.794 jiwa (50,31%). Jika dibandingkan dengan penduduk di tahun 2018 sejumlah 1.437.225 Jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 0,239 % atau bertambah 3.473 jiwa.

Dari sebaran penduduk per kecamatan, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Kramat dan Kecamatan Pangkah adalah kecamatan dengan penduduk terbanyak dengan jumlah >100.000 penduduk dengan luas wilayah seluas 35,51 Km². Sedangkan Kecamatan Kedungbanteng adalah kecamatan dengan penduduk paling sedikit dengan jumlah <50.000 penduduk dengan luas wilayah seluas 87,62 km². Secara garis besar, sebaran penduduk di tiap kecamatan terlihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Tegal Pada Tahun 2018 dan 2019

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Peduduk (jiwa)	
		2018	2019
1. Margasari	86,83	96.112	96.142
2. Bumijawa	88,56	84.844	84.814
3. Bojong	58,52	62.197	62.239
4. Balapulang	74,91	82.318	82.281
5. Pagerbarang	43,00	52.844	52.831
6. Lebaksiu	40,95	84.203	84.146
7. Jatinegara	79,62	54.281	54.262
8. Kedungbanteng	87,62	40.562	40.536
9. Pangkah	35,51	101.652	101.839
10. Slawi	13,89	72.686	73.035
11. Dukuhwaru	26,30	60.125	60.255
12. Adiwerna	23,86	120.016	120.032
13. Dukuhturi	17,48	89.237	89.236
14. Talang	18,39	103.090	103.754
15. Tarub	26,82	78.893	79.106
16. Kramat	38,49	111.855	113.892
17. Suradadi	55,73	81.819	81.815
18. Warureja	62,31	60.491	60.480
Jumlah	878,79	1.437.225	1.440.698

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2020

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2019 berdasarkan data proyeksi yang bersifat sangat sementara adalah sejumlah 958.130 jiwa, dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sejumlah 481.969 jiwa. Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif, maka akan dapat diketahui Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio). Angka beban ketergantungan Kabupaten Tegal pada tahun 2019 adalah sebesar 50,30%. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 51 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan usia di tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3.
Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2018 dan 2019

Usia	2018	2019*
0 – 4	125.283	125.534
5 – 9	128.543	128.800
10 – 14	132.111	132.375
15 – 19	120.599	120.840
20 – 24	114.588	114.817
25 – 29	109.527	109.746
30 – 34	103.541	103.748
35 – 39	103.564	103.771
40 – 44	93.757	93.945
45 – 49	87.140	87.314
50 – 54	84.609	84.778
55 – 59	76.213	76.365
60 – 64	62.680	62.805
65 +	95.070	95.287
Jumlah	1.437.225	1.440.698

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2020 (diolah)

*Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kabupaten Tegal hampir merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, SMA/MA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SD/MI sederajat sebesar 44,31%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 5,12% yang terdiri dari tamatan Diploma I/II/III sebesar 1,71% dan tamatan D IV, S1, S2, dan S3 sebesar 3,41%. Berikut ini tabel 1.4 penduduk Kabupaten Tegal dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2018 JUMLAH (JIWA)	%	2019*JUMLAH (JIWA)	(%)
1	SD/lebih rendah	532.320	50,44	470.540	44,31
2	SMP/sederajat	234.740	22,24	246.786	23,24
3	SMA Umum	108.708	10,30	93.621	8,82
4	SMA Kejuruan	111.044	10,52	196.658	18,52
5	Diploma I/II/III	16.084	1,52	18.183	1,71
6	Universitas	52.514	4,98	36.224	3,41
	J U M L A H	1.055.410	100	1.062.011	100

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2020 (diolah)

* Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2019 secara lengkap dapat terlihat pada tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2019

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	2019 JUMLAH (JIWA)*	%
1	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	107.929	17,12
2	Pertambangan dan Penggalian	7.490	1,19
3	Industri Pengolahan	149.754	23,75
4	Listrik, Gas dan Air	1.524	0,24
5	Bangunan	47.779	7,58
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel	184.184	29,21
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	29.785	4,72
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanaha	13.362	2,12
9	Jasa Kemasyarakatan	88.786	14,08
	JUMLAH	630.593	100

Sumber : Bappeda dan Litbang Tahun 2020 (diolah)

*Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan lapangan pekerjaan utama, penduduk Kabupaten Tegal sebagian besar bekerja di sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi (29,21%), Industri (23,75%) dan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan (17,12%), dan Jasa (14,08%), sedangkan lapangan usaha lainnya mencapai 15,84 %.

1.4 GAMBARAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Untuk mengukur kualitas hidup, terutama yang terkait dengan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Sejak data tahun 2014, IPM dilihat dengan menggunakan indikator metode pengukuran yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya IPM diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH),

Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah dan Konsumsi Per Kapita, dari tahun 2014 digunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli.

Nilai IPM pada tahun 2019 sebesar 68,24. Angka tersebut meningkat sebesar 0,91 dibanding tahun 2018 yang sebesar 67,33. Perkembangan IPM Kabupaten Tegal berdasarkan metode baru dapat dilihat dalam gambar 1.4 berikut:



Gambar 1.4 Perkembangan IPM Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019

Sumber : BPS Kabupaten Tegal BPS.

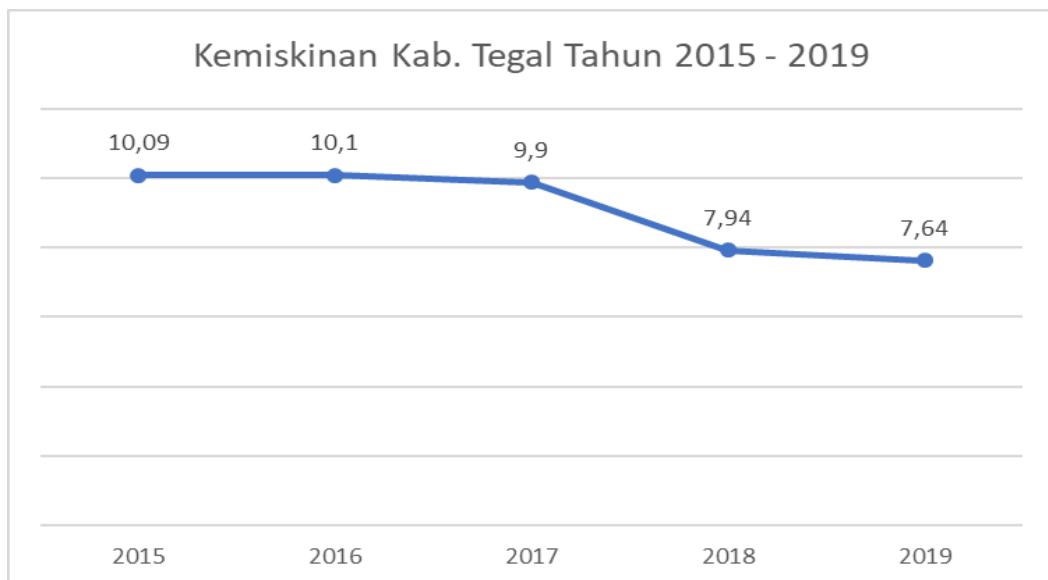
Indikator IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2015 – 2019 adalah sebagaimana tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal Metode Baru
Tahun 2015 – 2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	IPM	65,04	65,84	66,44	67,33	68,24
1	- Angka Harapan Hidup (tahun)	70,90	71,02	71,14	71,28	71,40
2	- Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,00	12,01	12,06	12,34	12,58
3	- Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,30	6,54	6,55	6,7	6,86
4	- Pengeluaran (Ribuan Rupiah/orang/tahun)	8.367	8.709	9.136	9.433	9.789

Sumber: BPS Kabupaten Tegal

Indikator lain untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah melalui angka kemiskinan. Angka kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin dibanding dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Dalam arah kebijakan tahun 2019 angka kemiskinan ditetapkan sebesar 8,75%, adapun realisasinya adalah sebesar 7,64%. Dengan demikian angka kemiskinan di Kabupaten Tegal tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar 7,94%. Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam Gambar 1.5 berikut:



Gambar 1.5 Perkembangan Angka Kemiskinan Kab Tegal Tahun 2015-2019
 Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2020

Persentase angka kemiskinan ini diperoleh melalui metode survey untuk mendapatkan gambaran atau informasi kemiskinan di daerah yang dilakukan secara periodik oleh BPS. Dengan metode survey ini tidak diketahui *by name by address* penduduk miskin. Untuk kepentingan intervensi program dilakukan pendataan melalui metode sensus oleh TNP2K dengan pelaksana teknis BPS. Sensus penduduk miskin dilakukan dalam jangka waktu menengah (5 tahunan). Sensus penduduk miskin dilakukan dalam pendataan PPLS 2011 yang disempurnakan dalam PBDT 2015 dan telah dimutakhirkan lagi dalam PBDT 2019.

Sensus penduduk miskin (PBDT) merilis 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah sebagai fokus intervensi program penanggulangan kemiskinan. Sehingga terdapat perbedaan metodologi antara PBDT dan survey penduduk miskin. Untuk kondisi Kabupaten Tegal angka kemiskinan absolut sebesar 7,64% dan tidak diketahui *by name by*

address-nya. Sementara angka sensus kemiskinan 40% kesejahteraan terendah Kabupaten Tegal pada tahun 2015 sebesar 167.101 rumah tangga, 661.792 jiwa beserta *by name by address* sebagai dasar penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan daerah.

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap Rumah Tangga Miskin dimana dari jumlah rumah tangga miskin hasil PBDT pada tahun 2015 sebanyak 167.101 rumah tangga menjadi 184.070 rumah tangga. Hal ini dikarenakan adanya rumah tangga yang meninggal (111 rumah tangga), pindah (201 rumah tangga), dan sebanyak 33 rumah tangga tidak ditemukan serta penambahan baru sebanyak 1.318 rumah tangga. Adapun secara rinci terkait data penduduk miskin adalah sebagaimana tabel 1.7. berikut.

Tabel 1.7.
Data Penduduk Miskin Hasil PBDT Tahun 2015 dan Verifikasi Tahun 2019.

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH RT PBDT TAHUN 2015	HASIL VERIFIKASI (RT) TAHUN 2019				JUMLAH HASIL VERIFIKASI 2019
			MENINGGAL	PINDAH	TIDAK DITEMUKAN	TAMBAH BARU	
1	WARUREJA	8.879	-	-	-	50	9.760
2	TARUB	11.232	-	-	-	6	12.363
3	TALANG	7.346	-	-	-	18	8.390
4	SURADADI	10.356	-	-	-	-	11.263
5	SLAWI	5.830	-	-	-	3	6.724
6	PANGKAH	11.629	-	-	-	4	13.038
7	PAGERBARANG	6.793	-	-	-	-	7.278
8	MARGASARI	11.498	-	-	-	2	12.515
9	LEBAKSIU	10.497	82	199	30	633	11.094
10	KRAMAT	7.752	-	-	-	24	8.872
11	KEDUNGBANTENG	6.919	-	-	-	30	7.467
12	JATINEGARA	7.762	-	-	-	-	8.459
13	DUKUHWARU	6.501	5	-	2	-	7.255
14	DUKUHTURI	7.342	-	-	-	-	8.605
15	BUMIJAWA	12.625	-	-	-	120	13.992
16	BOJONG	9.853	-	-	-	87	10.691
17	BALAPULANG	14.258	-	-	-	8	15.408
18	ADIWERNA	10.029	24	2	1	33	11.175
	JUMLAH	167.101	111	201	33	1.318	184.349

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja usia 15–64 tahun yang menganggur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan angkatan kerja yang tersedia. Tingkat Pengangguran Terbuka dapat pula menjadi

indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal. Dalam arah kebijakan tahun 2019 TPT ditetapkan sebesar 3,96 – 4,06%, namun realisasinya adalah 8,21%. Dibanding tahun 2018 maka TPT Kabupaten Tegal mengalami penurunan angka TPT dari 8,45% menjadi 8,21% atau ada penurunan sebesar 0,24%.

Tabel 1.8.
Jumlah angkatan kerja, pengangguran dan TPT tahun 2018 - 2019

No.	Uraian	2018	2019	Tambah/ (Kurang)
1.	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	688.796	703.440	14.644
2.	Jumlah Pengangguran (jiwa)	58.203	57.742	(461)
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	8,45	8,21	0,24

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, adanya penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka hal ini berbanding lurus dengan jumlah pengangguran di Kabupaten Tegal. Menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka seiring dengan jumlah pengangguran di Kabupaten Tegal mengalami penurunan sebesar 461 jiwa dari tahun 2018 sebesar 58.203 jiwa menjadi 57.742 jiwa di tahun 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka juga dipengaruhi oleh semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja, dimana jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 sebanyak 703.440 jiwa atau mengalami kenaikan sebanyak 14.644 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 688.796 jiwa. TPT 2019 sebesar 8,21% artinya pada tahun 2019, ada 8 dari 100 penduduk ikut aktif dalam pasar tenaga kerja, tercatat sebagai pengangguran (mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja).

Dengan meningkatnya kesempatan kerja, khususnya di Kabupaten Tegal, pasar tenaga kerja berhasil menyerap 645.698 penduduk usia kerja untuk bekerja. Jika dibandingkan dengan kondisi 2018 (630.593 orang), maka ada 15.105 orang yang terserap oleh pasar tenaga kerja di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 (tenaga kerja baru).

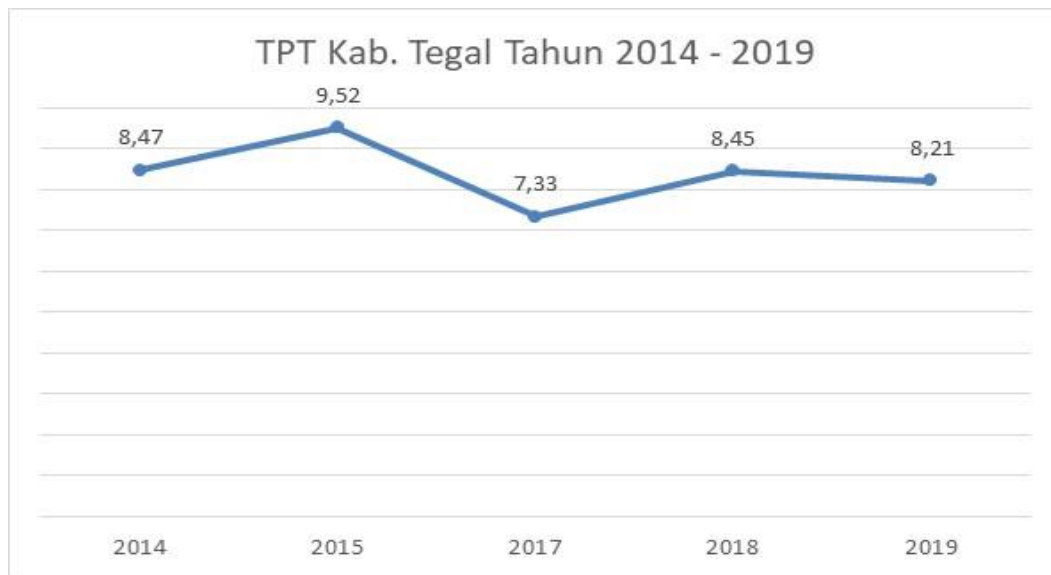
Dilihat dari klasifikasi wilayah, 6,77 persen pengangguran berada di wilayah perdesaan, artinya 6,77% dari penduduk usia kerja di pedesaan yang masuk angkatan kerja adalah penganggur dan 8,99 persennya di wilayah perkotaan, artinya 8,99% dari penduduk usia kerja di perkotaan yang masuk angkatan kerja adalah penganggur. Dilihat dari data yang ada, penyerapan tenaga kerja di wilayah perdesaan mencapai 2 kali lipat penyerapan tenaga kerja di wilayah perkotaan. Hal ini dimungkinkan terkait efektifitas dana desa yang berhasil menumbuhkan perekonomian di wilayah perdesaan.

Penyerapan lulusan sekolah oleh pasar tenaga kerja di Kabupaten Tegal dipengaruhi perbaikan ekonomi ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,58%, dari sebelumnya sebesar 5,51%. Pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan berkontribusi positif terhadap penumbuhan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan tahun 2019 tercatat sebesar 4,43%, meningkat dari angka 3,80% pada tahun 2018. Selain pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, pertumbuhan ekonomi di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga berpengaruh terhadap penumbuhan lapangan kerja baru. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,74%, meningkat dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang hanya sebesar 6,33%.

Adanya berbagai program terkait kewirausahaan dan ketenagakerjaan di Kabupaten Tegal dapat menaikkan persentase tenaga kerja yang berstatus sebagai pengusaha menjadi 43,23% pada tahun 2019, tahun sebelumnya hanya mencapai 37,66%. Dan tenaga kerja berstatus buruh/karyawan turun menjadi 35,32% tenaga kerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, tahun 2018 mencapai 40,04%. Status sebagai buruh/karyawan mendominasi wilayah perkotaan maupun perdesaan baik laki-laki maupun perempuan.

Data Sakernas 2019 memperlihatkan dari 645.698 penduduk yang bekerja, 54,53% persen berpendidikan SD kebawah. 19% berpendidikan SMP, 8,69% berpendidikan SMU, 11,63% persen berpendidikan SMK, dan sisanya lulusan perguruan tinggi. Dan sebaliknya 28,45% persen pengangguran berpendidikan SD kebawah. 29,81% berpendidikan SMP, 9,01% berpendidikan SMU, 29,20% berpendidikan SMK, dan sisanya lulusan

perguruan tinggi. Jika dicermati, maka ada perbaikan yang sangat nyata yaitu, jumlah pengangguran lulusan SMU sangat jauh berkurang dari tahun 2018 yang mencapai 23,81%.



Gambar 1.6 Perkembangan TPT Kabupaten Tegal 2014 - 2019

Sumber : BPS Kabupaten Tegal tahun 2019.

Dari gambar 1.6 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan indikator TPT Kabupaten Tegal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 masih berfluktuasi, penurunan angka TPT terakhir pada tahun 2019 sebesar 0,24%.

Di bidang perekonomian, kinerja perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Penyajian PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi pada tabel 1.9 berikut :

TABEL 1.9
PDRB KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 DAN 2019

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2018	2019*	2018	2019*
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	4.395.637,80	4.495.443,15	3.001.385,12	3.011.429,74
2	Pertambangan dan Penggalian	1.501.669,83	1.521.873,96	950.494,40	984.192,72
3	Industri Pengolahan	11.694.230,31	12.189.624,62	7.737.577,82	7.985.855,49
4	Pengadaan Listrik Gas	21.020,22	22.354,71	17.354,26	18.350,99
5	Pengadaan Air	11.320,91	11.780,69	10.328,77	10.679,68
6	Konstruksi	2.514.327,11	2.740.426,54	1.871.005,74	1.980.596,87
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan Perawatan mobil dan Sepeda Motor	4.942.943,53	5.449.555,30	3.954.562,55	4.307.730,96
8	Transportasi dan Pergudangan	899.883,09	993.903,23	724.207,50	776.580,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.402.152,54	1.567.013,84	1.092.854,31	1.214.937,64
10	Informasi dan Komunikasi	863.787,54	1.046.918,11	877.419,74	1.048.772,46
11	Jasa Keuangan	751.377,45	793.394,40	516.328,24	529.174,58
12	Real Estate	535.851,35	562.973,80	428.500,96	460.391,86
13	Jasa Perusahaan	141.499,73	153.322,63	102.918,94	111.605,92
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	695.063,70	731.135,80	480.794,36	492.986,72
15	Jasa Pendidikan	1.766.445,24	1.888.350,37	1.052.730,62	1.107.659,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	256.424,33	282.368,04	192.456,53	208.639,12
17	Jasa Lainnya	685.599,42	781.248,37	541.628,51	617.143,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		33.079.234,10	35.231.687,56	23.552.548,37	24.866.727,91

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2019

Sejak tahun 2014, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan System of National Accounts 2008 (SNA 2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip - prinsip ekonomi. Jika sebelumnya terdapat 9 jenis lapangan usaha, di penghitungan PDRB yang baru digunakan 17 jenis lapangan usaha. Selain itu, hal baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2014 adalah penggunaan tahun dasar penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2010.

Berdasarkan jenis lapangan usaha PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku didominasi oleh lapangan usaha industri Pengolahan 34,60%,

Perdagangan besar dan eceran 15,47% dan Pertanian kehutanan dan perikanan 12,14 %. Dari hasil penghitungan, terjadi perubahan agregat PDRB tahun 2018 sebesar 33.079.234,10 juta Rupiah menjadi 35.231.687,56 juta Rupiah di Tahun 2019 sehingga terjadi penambahan sebesar 2.152.453,46 juta Rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 6,51%. Sedangkan apabila menurut harga konstan, maka pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,81% atau mengalami kenaikan sebesar 1.334.179,54 juta Rupiah, dari 23.552.548,37 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi 24.866.727,91 juta rupiah pada tahun 2019.

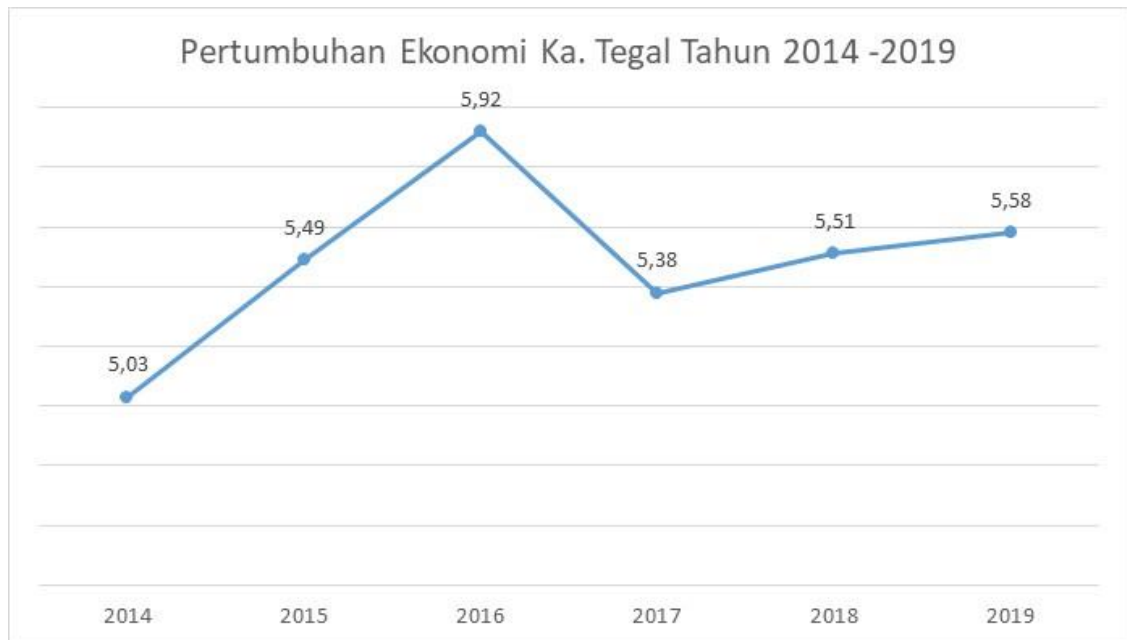
TABEL 1.10
PDRB KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 DAN 2019

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2018	2019*	2018	2019*
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	13,29	12,76	12,74	12,14
2	Pertambangan dan Penggalian	4,54	4,32	4,04	3,97
3	Industri Pengolahan	35,35	34,60	32,85	32,19
4	Pengadaan Listrik Gas	0,06	0,06	0,07	0,07
5	Pengadaan Air	0,03	0,03	1,91	0,04
6	Konstruksi	7,60	7,78	7,94	7,98
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan Perawatan mobil dan Sepeda Motor	14,94	15,47	16,79	17,37
8	Transportasi dan Pergudangan	2,72	2,82	3,07	3,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,24	4,45	4,64	4,90
10	Informasi dan Komunikasi	2,61	2,97	3,73	4,23
11	Jasa Keuangan	2,27	2,25	2,19	2,13
12	Real Estate	1,62	1,60	1,82	1,86
13	Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,44	0,45
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,10	2,08	2,04	1,99
15	Jasa Pendidikan	5,34	5,36	4,47	4,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,80	0,82	0,84
17	Jasa Lainnya	2,07	2,22	2,30	2,49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Tegal

Indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi Kabupaten Tegal juga dapat terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan *output* agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Dalam arah kebijakan tahun 2019 LPE Kabupaten Tegal ditetapkan sebesar 5,85 ± 0,25%, terealisasi 5,58%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, LPE Kabupaten Tegal mengalami peningkatan. Angka LPE Kabupaten Tegal tahun 2019 lebih tinggi

dibandingkan LPE nasional (5,02%) dan LPE Provinsi Jawa Tengah hampirimbang (5,66%). Perkembangan LPE Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam gambar 1.7 berikut ini:



Gambar 1.7 Perkembangan LPE Kabupaten Tegal Tahun 2014 - 2019

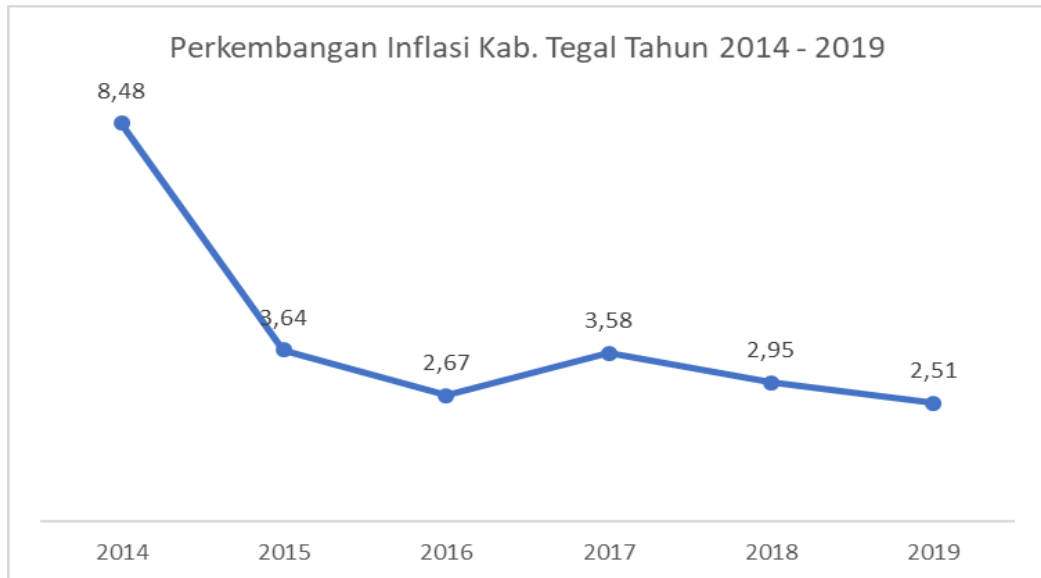
Dari sisi inflasi, dalam arah kebijakan tahun 2019 laju inflasi ditetapkan sebesar $5,75 \pm 0,5\%$. Namun realisasinya adalah sebesar 2,51%. Laju Inflasi Kabupaten Tegal di tahun 2019 lebih rendah dibandingkan laju inflasi di tahun 2018 yang mencapai 2,95%.

**Tabel 1.11
PERKEMBANGAN LAJU INFLASI TAHUN 2018 DAN 2019**

No	Bulan	2018	2019
1	Januari	0,91	0,22
2	Pebruari	0,09	-0,16
3	Maret	-0,04	0,21
4	April	0,04	0,36
5	Mei	0,13	0,33
6	Juni	0,74	0,56
7	Juli	0,13	0,41
8	Agustus	-0,13	0,13
9	September	-0,01	-0,18
10	Oktober	0,29	0,06
11	November	0,29	0,18
12	Desember	0,46	0,38

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2020 (diolah)

Perkembangan inflasi Kabupaten Tegal tahun 2014 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 1.8 di bawah ini:



Gambar 1.8. Laju Inflasi Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019

Sumber : BPS Kabupaten Tegal tahun 2019

Selama tahun 2019 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mencapai 2,51 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,95 persen.

Laju inflasi tahun 2019 sebesar 2,51% didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan yang mengalami inflasi sebesar 5,56 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,93 persen. Berikutnya kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,25 persen dan memberikan andil inflasi 0,73 persen.

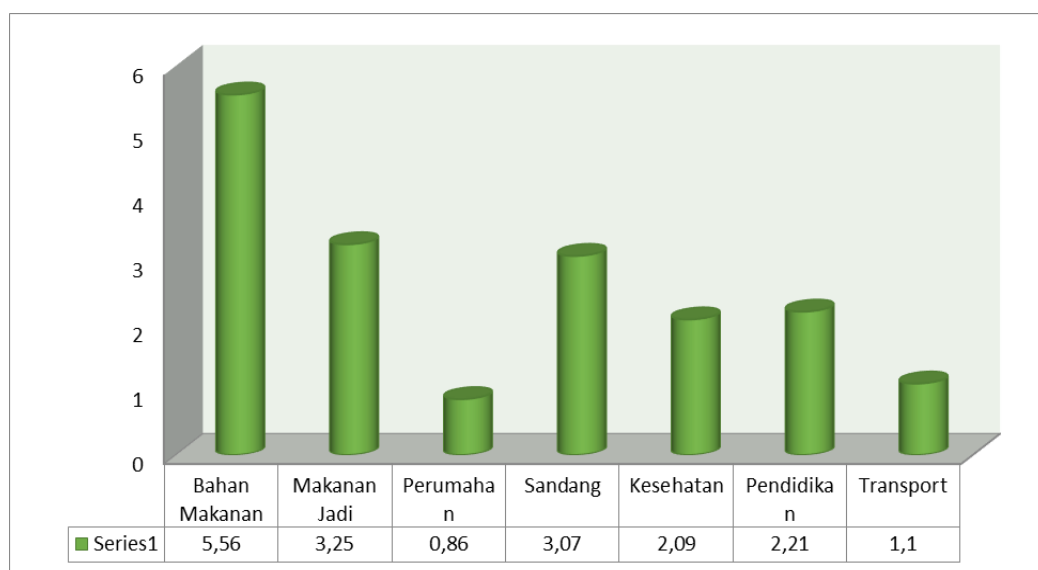
Sedangkan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; yang pada tahun 2018 memberikan andil inflasi terbesar, selama tahun kalender 2019 mengalami inflasi sebesar 0,86 persen dan memberikan andil inflasi yang cukup besar, yakni 0,26 persen.

Kelompok yang lain, yakni kelompok sandang memberikan andil inflasi sebesar 0,21 persen; kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,14 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 0,13 persen; dan terakhir kelompok kesehatan 0,12 persen.

Kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan dikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok Bumbu-Bumbuan yang mengalami inflasi sebesar 42,88 persen; sub kelompok Sayur-sayuran

sebesar 13,21 persen; dan sub kelompok Buah-buahan sebesar 7,84 persen. Sedangkan sub kelompok lainnya mengalami inflasi dibawah 5 persen, bahkan sub kelompok daging dan hasil-hasilnya mengalami deflasi sebesar 0,18 persen; yang utamanya disebabkan penurunan harga daging ayam ras.

Secara keseluruhan, sub kelompok yang mengalami penurunan indeks cukup besar yakni sub kelompok Bahan Bakar, Penerangan dan Air; yang turun sebesar 0,34 persen; dimana hal tersebut utamanya dikarenakan penurunan harga bensin dan tarif listrik.



Gambar 1.9. Inflasi Tahun Kalender 2019 Menurut 7 Kelompok Barang/Jasa
 Sumber : BPS Kabupaten Tegal tahun 2020

Kenaikan indeks (inflasi) paling tajam terjadi pada bulan Juni 2019 sebesar 0,56 persen; sedangkan penurunan indeks (deflasi) paling tajam terjadi pada bulan September sebesar 0,18 persen. Pada bulan-bulan musim panen padi pada setiap subround yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember fluktuasi harga cukup terkendali dan masih dalam rentang harga yang wajar.

1.5 VISI MISI KABUPATEN TEGAL

Visi dan misi RPJMD merupakan gambaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap

memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

1.5.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**

Arti Visi:

Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.

Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan.

Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.

Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai – nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.

Berakhlak : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

1.5.2 Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.

Misi ini bermakna bagaimana agenda reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani, sampai dengan level pemerintahan desa. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, downsizing dan rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi; rekayasa proses administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif. Tata kelola pemerintahan desa juga menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan alokasi anggaran desa yang dari tahun ke tahun semakin tinggi, maka perlu terus dilakukan pengawalan kebijakan dalam implementasinya.

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka penting adanya pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal. Perwujudan E-Government sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Target pemerintah daerah dan tingginya ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang andal dan berkualitas tentu harus direspons dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan backlog rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini memiliki makna pembangunan ekonomi rakyat yang kokoh dan maju yaitu adanya hasil-hasil pembangunan yang tidak hanya tampak dari segi kuantitas melainkan juga secara kualitas yang dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi berkeadilan dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendirikan atau membentuk dengan dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah.

Dalam konsep ekonomi, artinya masyarakat mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan. Konsep pertumbuhan ekonomi berkeadilan di Kabupaten Tegal dikemas dalam *Triple track strategy*, yang terdiri dari *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi); *pro-poor* (mengentaskan kemiskinan); dan *pro-job* (penciptaan lapangan kerja/ penurunan pengangguran). *Pro Growth Strategy* juga mencakup strategi pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki usaha pada sektor-sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. *Pro-growth* selanjutnya diharap dapat mendorong program pengentasan kemiskinan atau *Pro-poor* dan penciptaan lapangan kerja atau *Pro-job*.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, diharapkan tidak mengorbankan aspek-aspek sosial dan juga tidak menimbulkan gradasi lingkungan (*Enviromental Gradient*). Penerapan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi tinggi yaitu pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri pengolahan harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan, program dan kegiatannya.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi ini memiliki makna peningkatan kualitas hidup manusia untuk membentuk karakter dan kualitas sumberdaya manusia

yang pintar, sehat, sejahtera dan berakhlak mulia melalui penyelenggaraan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata dan bermutu. Instrumen dasar dalam penguatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah perangkat ampuh dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, serta harus dilaksanakan secara kolaboratif dengan lintas sektor. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran menjadi tujuan utama dalam implementasi Misi keempat ini, dengan sasaran antara lain peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, pemberdayaan dan pembangunan gender serta peningkatan kualitas pemuda dan olahraga.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan pemanfaatan atas hasil pengkajian kelitbangsan untuk dapat diterapkan dalam rangka mendukung program-program bidang pendidikan dan kesehatan. Pemanfaatan dan dukungan teknologi informasi juga menjadi faktor yang penting dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi pada upaya peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja / organisasi merupakan satu kesatuan kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dalam proses kerjanya sebagai suatu sistem.

- 5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.**

Misi ini memiliki makna untuk mewujudkan ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkokoh kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan ke bhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, peningkatan upaya penegakan perda, peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel, perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan peningkatan promosi seni budaya.

1.6 PRIORITAS DAN SASARAN RKPD 2019

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai dasar penjabaran dan kajian arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan pada periode RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 dan serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tetap memperhatikan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk merumuskan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 maka kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tahun 2019 mempunyai prioritas dan sararan sebagai landasan substansi penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019. Sebagaimana dijelaskan

sebelumnya bahwa arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan pada periode RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 dan serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tetap memperhatikan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk merumuskan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya.

1.6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5%;
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217ribu;
4. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Tema RKP Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 adalah Holistik, Tematik, Integratif, Dan Spasial melalui penguatan kebijakan Money Follow Program.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang merupakan rencana pembangunan nasional tahun 2019 diprioritaskan pada 5 (lima) prioritas yaitu :

1. Pendidikan Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

1.6.2 Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah daerah tahun 2019

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2019 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka panjang tahun 2015-2019. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 ditujukan untuk “Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2019 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2019, meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM;
4. Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
5. Ketahanan Pangan dan Energi;
6. Kesenjangan Wilayah;
7. Tata Kelola Pemerintahan.

1.6.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019

Dalam rangka menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, RKPД Kabupaten Tegal Tahun 2019 disusun dengan:

1. Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Memperhatikan arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPД Tahun 2019.
4. Mempedomani Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019, terkait target kinerja program dan pagu anggaran masing-masing program yang terdapat dalam Bab VIII RPJMD.
5. Menyusun Rencana Kerja dengan memprioritaskan program dan kegiatan untuk penuntasan capaian kinerja RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPД Kabupaten Tegal Tahun 2017;
6. Memperhatikan kewenangan dan tugas fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7. Mendorong pencapaian indikator kinerja makro ekonomi daerah yang mampu mengantisipasi tantangan dan prospek ekonomi Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah. Adapun sasaran makro pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Mendorong percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2019 yang direncanakan tumbuh $5,85 \pm 0,25$ % dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim investasi yang kondusif, dukungan ketersediaan infrastruktur, nilai tambah industri semakin meningkat, dan kualitas belanja pemerintah dan penyerapan anggarannya yang membaik.
 - b. Mengupayakan percepatan penurunan tingkat kemiskinan penduduk pada kisaran 9,83 % di Tahun 2019 melalui peningkatan dan perluasan intervensi program penanggulangan kemiskinan, afirmasi pembangunan wilayah tertinggal dengan dukungan program percepatan (quick wins), dan penguatan sistem perlindungan dan jaminan sosial.
 - c. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,6 – 6,5% di tahun 2019 dengan memperluas kesempatan kerja.
 - d. Menekan laju inflasi pada kisaran $5,75 \pm 0,5$ %.
 - e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 65,8 – 66,7 di tahun 2019 melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penguatan daya beli masyarakat.
8. Memperhatikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) Tahun 2016-2030.
9. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur.
10. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada

masyarakat secara merata;

11. Meningkatkan kelengkapan, akurasi, validasi dan pemanfaatan data dan informasi dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.
12. Menerapkan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 diarahkan untuk “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi lokal yang didukung pembangunan sarana prasarana infrastruktur untuk mewujudkan kemandirian, keunggulan dan kesejahteraan masyarakat.”. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019 ditujukan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, yang difokuskan pada :
 - a. Penyediaan akses kebutuhan dasar berupa rumah layak huni untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan.
 - b. Penyediaan akses layanan air bersih dan sanitasi untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan.
 - c. Penanganan kawasan permukiman kumuh.
 - d. Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis.
 - e. Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi.
 - f. Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan murah dan terjangkau.
 - g. Menyediakan biaya pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).

- h. Penyediaan anggaran bantuan sosial bagi kelompok yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan dan keagamaan tetapi memiliki kerentanan masalah sosial.
 - i. Pelatihan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja dengan sasaran darai keluarga miskin.
 - j. Penguatan basis data kemiskinan, yang berbasis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu dengan melibatkan swasta dan pihak lainnya.
 - k. Penyediaan jaminan hidup miskin absolut dimana warga miskin absolut, yaitu tidak punya tempat tinggal milik sendiri, hidup di bantaran sungai, tidak ada yang memelihara, tidak punya penghasilan, dan bergantung belas kasihan warga, serta sakit berat dan tidak mampu berobat. Pemerintah akan memfasilitasi jaminan rumah (jarum) bagi warga yang belum memiliki rumah, jaminan hidup (jadup) berupa uang saku setiap bulan bagi warga yang tidak produktif, serta jaminan kesehatan (jakes) bagi warga miskin yang sakit berat dan tidak termasuk sakit yang dibiayai JKN
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang difokuskan pada:
- a. Memenuhi target kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini dan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan penuntasan Angka Putus Sekolah.
 - b. Penyediaan sarana prasarana sekolah yang memadai dengan melakukan pembangunan dan atau rehabilitasi ruang kelas yang sesuai standar pelayanan minimal; penyediaan Perpustakaan beserta kelengkapan buku-bukunya; dan penyediaan sanitasi sekolah yang memenuhi standar kelayakan.
 - c. Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
 - d. Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.
 - e. Menjamin ketersediaan sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar.

- f. Mengoptimalkan cakupan pertolongan persalinan melalui fasilitas pelayanan PONEB di Puskesmas sesuai Standar Pelayanan Minimal.
 - g. Memenuhi target capaian kinerja cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat dan cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat.
 - h. Mengoptimalkan cakupan pelayanan khusus dan pelayanan rujukan, serta cakupan call center dan jejaring Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
 - i. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
 - j. Mengoptimalkan capaian kinerja program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan bayi lahir hidup.
 - k. Menjamin perlindungan perempuan dan anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan trafficking.
 - l. Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.
 - m. Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
 - n. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial dan layanan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
 - o. Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana.
3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif, yang difokuskan pada :
- a. Peningkatan produksi unggul pertanian melalui optimalisasi kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi; promosi hasil produk pertanian; dan penerapan kebijakan pemanfaatan hasil produk pertanian lokal untuk berbagai acara/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
 - b. Pembangunan infrastruktur pertanian dan industri pendukungnya berdasarkan kebutuhan wilayah.
 - c. Revitalisasi kelembagaan pertanian melalui penguatan kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok

- Peternak, dan Penyuluh serta difasilitasi agar kelompok memiliki Badan Hukum.
- d. Penumbuhan pelaku usaha baru sektor pertanian dan industri pendukungnya melalui sinergi industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (backward dan forward linkage), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.
 - e. Pengembangan fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan melalui pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah; dan penciptaan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat serta berdaya saing.
 - f. Peningkatan jejaring perdagangan pasar tradisional melalui kerjasama informasi harga;
 - g. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat menempati sesuai dengan aturan peruntukan ruang.
 - h. Peningkatan produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan serta ekonomi kreatif melalui penyusunan roadmap pengembangan industri lokal unggulan; kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (litbang) Kementerian / Lembaga / Perguruan Tinggi dan penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul local.
 - i. Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal untuk diadaptasi menjadi Teknologi Tepat Guna.
 - j. Peningkatan produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal.
4. Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah, yang difokuskan pada :
- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)

- melalui penyediaan akses jalan, ruang terbuka hijau dengan sarana prasarana perekonomian yang mendukung, air bersih, dan sanitasi.
- b. Memenuhi capaian target kinerja panjang jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik sesuai standar Bina Marga.
 - c. Mengarahkan pemanfaatan Dana Desa untuk peningkatan jalan kewenangan Desa dalam kondisi baik sesuai standar Bina Marga.
 - d. Memenuhi capaian target kinerja sarana pendukung jalan berupa drainase dan talud yang terbangun, direhabilitasi dan berfungsi baik.
 - e. Optimalisasi capaian target kinerja pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya.
 - f. Optimalisasi capaian target kinerja pengembangan dan pengelolaan persampahan.
 - g. Peningkatan persentase ruang terbuka terhadap luasan melalui perluasan dan penambahan jumlah taman kota; perluasan dan penambahan jumlah tempat berkumpul masyarakat sebagai sarana pengungkit ekonomi kerakyatan; dan peningkatan fasilitas kawasan GOR Tris Sanja.
 - h. Pengendalian industri pertambangan dan industri B3; serta melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi.
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang difokuskan pada :
- a. Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - b. Menerapkan sistem informasi e-government yang terintegrasi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - c. Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN.
 - d. Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Publik.
 - e. Melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh OPD.

- f. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.
 - g. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.
6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal, yang difokuskan pada:
- a. Menginisiasi dan mengembangkan wisata Desa dengan berbagai macam potensi dan keunikannya serta jejaring dengan Desa lainnya.
 - b. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal dan manca negara.
 - c. Membangun infrastruktur seni budaya lokal di simpul-simpul kesenian.
 - d. Memfasilitasi pentas seni budaya di tengah masyarakat sebagai daya tarik wisata.
 - e. Melakukan promosi dan pentas seni budaya di ajang promosi nasional dan internasional.
 - f. Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa regional, nasional dan internasional.
 - g. Memanfaatkan TIK dalam promosi seni budaya

Prioritas fokus pembangunan daerah dan prioritas program pembangunan daerah juga disusun mendasari permasalahan pembangunan Kabupaten Tegal dan isu-isu strategis yang diformulasikan sebagai kondisi yang perlu dihadap tahun 2019 di Kabupaten Tegal.

Berkaitan dengan hal tersebut maka keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2019 beserta dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional dapat dilihat dalam Tabel 1.12 berikut ini;

Tabel 1.12
Keterkaitan isu strategis dan Prioritas daerah dengan Prioritas Provinsi dan
Prioritas Nasional

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional
1	Kemiskinan	1. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	1. Penanggulangan kemiskinan	1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2	Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM	1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
3	Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif	3. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif	2. Penguatan daya saing ekonomi daerah 5. Ketahanan Pangan dan Energi	3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
4	Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	4. Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 6. Kesenjangan Wilayah	2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional
5	Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	5. mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan	4. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
6	Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	2. Penguatan daya saing ekonomi daerah	3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

Berkaitan dengan hal tersebut maka keterkaitan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan Kabupaten Tegal dan isu-isu strategis dapat dilihat dalam Tabel 1.13 Berikut ini;

Tabel 1.13.
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu-Isu Strategis dan Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2019

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
1. Kemiskinan	1. Kemiskinan	1. Penanggulangan <i>kemiskinan</i> melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN	
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinkes
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinkes

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinkes
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Dinkes
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Dinkes
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Dinkes
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinkes
			Program Pendidikan Anak Usia Dini;	Disdikbud
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;	Disdikbud
			Program Pendidikan Menengah;	Disdikbud
			Program Pendidikan Non Formal;	Disdikbud
			Program Pendidikan Luar Biasa;	Disdikbud
			STRATEGI II: MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN	

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	DKPP
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	DKPP
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi	DKPP
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	DKPP
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	DKPP
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DKPP
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DKPP
			STRATEGI III: MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN UMKM	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Disdakop dan UKM

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Disdakop dan UKM
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Disdakop dan UKM
			Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Disdakop dan UKM
			Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Disperinaker
			Program pengembangan industri kecil dan menengah	Disperinaker
			Program Penataan Struktur Industri	Disperinaker
2. Pelayanan Dasar Pendidikan 3. Derajat kesehatan masyarakat 4. Pengangguran	2. Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pendidikan Anak Usia Dini;	Disdikbud
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;	Disdikbud
			Program Pendidikan Menengah;	Disdikbud
			Program Pendidikan Non Formal;	Disdikbud
			Program Pendidikan Luar Biasa;	Disdikbud

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;	Disdikbud
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;	Dinkes
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinkes
			Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinkes
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Dinkes
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;	Dinkes
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata;	Dinkes
			Program Kemitraan Peningkatan	Dinkes

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
			Pelayanan Kesehatan	
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;	Dinkes
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;	Dinkes
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	Dinkes
5. Rendahnya Daya Saing Ekonomi Lokal	3. Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif	3. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;	Disdakop dan UKM
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;	Disdakop dan UKM
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;	Disdakop dan UKM
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;	DPMPTSP
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;	DPMPTSP
			Program Penyiapan Potensi	DPMPTSP

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
			Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;	
			Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.	DPMPTSP
			Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.	Disperinaker
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;	Disperinaker
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	Disperinaker
			Program Penataan Struktur Industri.	Disperinaker
6. Belum Optimalnya Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	4. Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	Disperkimtaru
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	DPU
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DPU

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
			Program rehabilitasi/peme liharan Jalan dan Jembatan	DPU
			Program Pembangunan turap/talud/bron jong	DPU
			Program rehabilitasi/peme liharan talud /bronjong	DPU
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	DPU
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;	DPU
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);	DLH
7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5. Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
			Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah	Bappeda dan Litbang
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;	DPMPTSP

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;	DPMPTSP
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;	DPMPTSP
			Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.	DPMPTSP
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Setda
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
			Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat
			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Diskominfo
			Program peningkatan kapasitas	BKD

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
			sumberdaya aparatur	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD
			Program Peningkatan Pelayanan Publik	BKD
8. Peningkatan daya saing pariwisata dan pengembangan destinasi wisatalokal	6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;	Disparpora
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;	Disparpora
			Program Pengembangan Kemitraan.	Disparpora
			Program Pengembangan Nilai Budaya	Disdikbud
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Disdikbud
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Disdikbud

Sementara itu keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2019 beserta dengan Kinerja Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan dapat dilihat dalam Tabel 1.14 Berikut ini;

Tabel 1.14
Keterkaitan Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	a) Persentase penduduk memiliki:		a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.	Disdukcapil
	- KTP	100	b. Program Pendidikan Anak Usia Dini;	Dikbud
	- Kartu Keluarga	100	c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;	Dikbud
	- Akta Kematian	30	d. Program Pendidikan Menengah;	Dikbud
	- Akta Kelahiran (0-18 tahun)	100	e. Program Pendidikan Non Formal;	Dikbud
	b) APK PAUD/TK (4-6 tahun)	85	f. Program Pendidikan Luar Biasa;	Dikbud
	c) APK PAUD/TK (0-4 tahun)	75	g. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;	Dikbud
	d) APK SD/SDLB/MI/Paket A	113	h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;	Dinkes
	e) APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99,00	i. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinkes
	f) APK SMA/SMALB/MA/Paket C	64,84	j. Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinkes
	g) APM PAUD TK	66,02	n. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Dinkes
h) APM SD/SDLB/MI/Paket A	99,00	o. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana	Dinkes	
i) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	93,49			

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	j) APM SMA/SMALB/MA/Paket C	62,04	Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;	
	k) AT SD ke SMP sederajat	99,81	p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata;	Dinkes
	l) AT SMP ke SMA sederajat	78,00		
	m) AMH	93,14	q. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinkes
	n) Angka lulusan SD/MI	99,99	r. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;	Dinkes
	o) Angka Lulusan SMP/ MTs	99,99	s. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;	Dinkes
	p) Angka Lulusan SMA/MA/SMK	99,99	t. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	Dinkes
	q) Angka Harapan Hidup	69,58	u. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;	Dinkes
	r) Jumlah kematian ibu	32		
	s) AKB	7,60	v. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;	Dinkes, DP3AP2KB
	t) AKABA	8,3	w. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;	Dinkes, DP3AP2KB
	u) Persentase Puskesmas Terakreditasi	100	x. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Dinkes
	v) Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	100	y. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;	Dinkes, Dinsos
	w) Persentase PPK BLUD Puskesmas	100		
	x) Klasifikasi RSUD dr. Soeselo	Kelas B		
	y) ISO RSUD dr. Soeselo	40%		
	z) Akreditasi RSUD dr. Soeselo	Paripurna		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	aa) Persentase penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	7,2	z. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;	Dinsos
	bb) Persentase pengguna narkoba yang direhabilitasi	14,2		
	cc) Persentase lansia terlantar yang dibina	12,2	aa. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;	Dinsos
	dd) Persentase jumlah anak yang terlantar, anak nakal, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan direhabilitasi	16	bb. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;	Dinsos
	ee) Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	7	cc. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial;	Dinsos
	ff) Persentase PMKS ditangani	30	dd. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;	Dinsos
	gg) Persentase eks WTS yang diberdayakan	9,8	ee. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	BPBD
	hh) Indeks Pembangunan Gender	65,72		
	ii) Indeks Pemberdayaan Gender	70,16		
	jj) Persentase korban bencana alam ditangani	100		
Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	a) Jumlah kasus KKN	0	a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;	Sekwan
	b) Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	144		
	c) Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan	95	b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;	SetDa
	d) Jumlah kasus kepegawaian	40		
	e) Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin	20	c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	BPKAD

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	f) Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 (satu) tahun	99,6	Daerah;	
	g) Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya (<i>skill, knowledge, attituted</i>)*	6	d. Program Pembinaan Administrasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Dispermasdes
	h) Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang ditindaklanjuti	90	e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;	Inspektorat
	i) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	80,05	f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;	Inspektorat
	j) Jumlah SIM	15	g. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	Inspektorat
	k) Persentase SIM yang berfungsi	100	h Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;	Diskominfo
	l) Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	WTP	i Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	SetDa
			j Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;	SetDa
			k Program Pendidikan Kedinasan;	BKD
			l Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKD
			m Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;	BKD
			n Program Peningkatan Pelayanan Publik	BKD

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
KEMISKINAN	PERTANIAN		PERTANIAN	
	a) Jumlah kelompok petani organik	1	a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan.	DISTANKP
	b) Jumlah jenis komoditas pertanian organik	1	b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;	DISTANKP
	(1) Yang didelegasikan	10 ha	c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;	DISTANKP
	(2) Yang bersertifikat	2 jenis	d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;	DISTANKP
	c) Jumlah produsen pertanian organik	10	e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;	DISTANKP
	d) Jumlah luas lahan pertanian organik	10 ha	f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;	DISTANKP
	e) Kajian produk unggulan dan <i>origin-destination</i> produk pertanian	1	g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;	DKPP
	f) Jumlah STA	1	h. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;	DKPP
	g) Jumlah pasar induk	1	i. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;	DKPP
	h) Jumlah PPI (Pusat Pendaratan Ikan)	2	j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;	DKPP
	i) Jumlah pasar hewan	5	k. Program Pengembangan Peternakan	DKPP
	j) Panjang jalan usaha tani (dan nelayan) yang ditingkatkan	12 km	l. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;	DLH
	k) Panjang saluran irigasi tersier yang ditingkatkan	15 km	m. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;	DLH
l) Panjang saluran irigasi utama yang ditingkatkan	7.500 m			
m) Jumlah/cakupan air irigasi yang tersedia	14.784 ha			

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	n) Jumlah embung lapangan berfungsi baik	45	n. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.	DLH
	o) Jumlah Kelompok Tani, Nelayan, Peternak:	529	o. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;	DKPP
	(1) Madya	480	p. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam	DKPP
	(2) Utama	58	Pendayagunaan Sumber Daya Laut;	
	p) Jumlah penyuluh yang lulus sertifikasi	187	q. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;	DKPP
	q) Jumlah penyuluh swadaya	18	r. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;	DKPP
	r) Jumlah kantor BPPP yang memenuhi persyaratan.	1	s. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	DKPP
	s) Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan	100% Perda	t. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi	DKPP
	t) Persentase luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dipertahankan	0,05	Perikanan;	
	u) Persentase maksimal laju alih fungsi lahan pertanian	3	u. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan	DKPP
	v) Jumlah demplot	2	Air Tawar.	
	w) Jumlah rekayasa TTG	1		
	x) Jumlah pemanfaatan hasil penelitian	1		
	y) Jumlah klaster pertanian	5		
	z) Jumlah <i>telecenter</i> bidang pertanian	2		
	aa) Jumlah <i>website</i> terkait pertanian	3		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	bb) Jumlah kerjasama pengusaha besar dan petani cc) Jumlah Kelompok (KPK, KWT, LMDH) industri pengolahan hasil pertanian	305		
Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif	PERDAGANGAN a) Jumlah pasar kabupaten dan desa yang direvitalisasi b) Jumlah pelaku usaha perdagangan baru c) Persentase kenaikan retribusi pasar d) Panjang jalan pendukung perdagangan lokal yang terpelihara e) Jumlah sistem informasi pasar (<i>telecenter</i> dsb) f) Jumlah pasar yang berjejaring g) Jumlah dokumen kajian penataan PKL h) Kawasan yang tertata PKL-nya i) Jumlah produk hukum daerah tentang jaringan toko ritel modern j) Tingkat kesesuaian penambahan jaringan toko ritel modern dengan aturan yang berlaku	10 600 3 50 km 5 10 3 10 1 Sesuai	PERDAGANGAN. a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; c. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	Disdag kop UKM Disdag kop UKM Disdag kop UKM

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	k) Jumlah pelaku UMKM yang menerima bantuan permodalan	100		
	l) Jumlah jenis usaha/kelompok usaha	50		
	m) Jumlah lembaga yang menyalurkan bantuan permodalan	5		
	n) Jumlah kegiatan perlindungan konsumen	4		
	o) Jumlah produsen /pedagang yang menerima sertifikat sehat	500		
	p) Persentase pengaduan konsumen yang masuk dan tertangani	100		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif	PRODUK UNGGULAN LAIN		PRODUK UNGGULAN LAIN	
	a) Jumlah <i>roadmap</i> pengembangan industri unggulan	1	a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;	Disperinaker
	b) Jumlah pelaku industri kreatif	120	b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;	Disperinaker
	c) Jumlah jenis industri kreatif	3	c. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	Disperinaker
	d) Jumlah pelatihan kewirausahaan industri kreatif pemuda	5	d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;	Disdag kop UKM
	e) Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan	180	e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;	Disdag kop UKM
	f) Jumlah IKM yang menerapkan manajemen Industri	48	f. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;	Disdag kop UKM
	g) Jumlah kearifan lokal yang diadaptasi	3	g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;	DPMPPTSP
	h) Jumlah TTG yang diterapkan melalui LIK (industri dan Balai Penyuluhan Pertanian Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (pertanian)	4 TTG	h. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;	DPMPPTSP
	i) Jumlah kerjasama tentang pengembangan ekonomi lokal unggulan	4	i. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;	DPMPPTSP
	j) Penetapan lokasi lokasi kawasan industri terpadu (<i>boned zone</i>)	1 lokasi siap	j. Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.	DPMPPTSP
	k) Promosi lokasi kawasan industri terpadu (<i>boned zone</i>) pada invenstor *	12	k. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.	Disperinaker
			l. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;	Disperinaker
			m. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	Disperinaker

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	l) Jumlah klaster industri dan pertanian aktif	17	n. Program Penataan Struktur Industri.	Disperinaker
	m) Jumlah kerjasama pengembangan klaster industri dan pertanian	6	o. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;	Diskominfo
	n) Jumlah klaster wisata aktif (Cacaban, Purin, Guci, Semedo)	4	p. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.	Diskominfo
	o) Jumlah peraturan tentang sistem insentif ekonomi lokal unggulan	1	q. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;	Diskominfo
	p) Jumlah <i>telecenter</i> yang dipelihara	1	r. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi	Diskominfo
	q) Jumlah <i>telecenter</i> baru	1	s. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;	Disparpora
	r) Jumlah produk lokal yang tersertifikasi dan terstandarisasi	13	t. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;	Disparpora
	s) Jumlah kebijakan penggunaan produk lokal dalam kegiatan Pemerintah Daerah	1	u. Program Pengembangan Kemitraan.	Disparpora
Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	KEWILAYAHAN		KEWILAYAHAN	
	a) Daftar wilayah tertinggal	1	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	DPU
	b) Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah tertinggal	6 km	b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;	DPU,
			c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;	Diskimtaruna

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	c) Jumlah pasar desa yang diperbaiki	15	d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;	DPU
	d) Jumlah kota satelit	1	e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong;	DPU
	e) Kualitas layanan di kota satelit (SMA/K: akreditasi A; pasar: bersih dan aman; puskesmas: ISO terkait pelayanan)	Sesuai SPM	f. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan.	DPU
	f) Jumlah telecenter aktif di wilayah tertinggal	3	g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;	DPU
	g) Jumlah pelatihan pengembangan wilayah tertinggal	1	h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;	DPU
	h) Terbentuknya lembaga kemasyarakatan yang aktif memberikan masukan dalam pengembangan wilayah tertinggal	1		
	i) Jumlah kajian RDTR	18		
	j) Jumlah Perda RDTR	18		
	k) Persentase pembangunan Jalingkos sisi barat	50		
	l) Persentase pembangunan Terminal Dukuhsalam	100		
	m) Frekuensi diseminasi Rencana Tata Ruang (termasuk sistem informasi) per tahun	4 kali		
	n) Frekuensi pemantauan lapangan per tahun	6 kali		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	o) Jumlah pelanggaran rencana tata ruang yang diproses per tahun	6		
Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	a) Jumlah ruang terbuka publik	5	a. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;	DPU
	b) Jumlah taman kota	5	b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah;	DPU
	c) Jumlah tempat berkumpul masyarakat	5	c. Program Pengendalian Banjir;	DPU
	d) Portal pengaduan masalah pembangunan daerah	1	d. Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	DPU
	e) Persentase usaha penambangan yang dipantau	90	e. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;	Diskimtaru
	f) Jumlah kawasan industri B3 yang terkontrol	1	f. Program Pengembangan Perumahan;	Diskimtaru
	g) Persentase pemantauan dokumen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL)	80	g. Program Lingkungan Sehat Perumahan;	Diskimtaru
	h) Persentase perusahaan pertambangan yang melakukan pemulihan lingkungan hidup	100	h. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran;	BPBD
			TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		a. Program Perencanaan Tata Ruang;	Bappeda	
		b. Program Pemanfaatan Ruang	Bappeda	

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
			c. Program Pengembangan Data/Informasi; d. Program Kerjasama Pembangunan; e. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; f. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; j. Program Perencanaan Sosial Budaya; k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana l. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; m. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; n. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; o. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas. p. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;	Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda BPBD Dishub Dishub Dishub Dishub DLH

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
			q. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup; r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; s. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam t. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH; u. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; v. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut. w. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); x. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah y. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	DLH DLH DLH DLH DLH DKPP Diskimtaru Diskimtaru Diskimtaru
Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	a) Jumlah petatar (guru) nilai-nilai agama dan kepercayaan budaya rukun dan toleran b) Jumlah lembaga pewarisan nilai-nilai agama dan kepercayaan	8.000 1.500	a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; b. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan;	Disparpora Disparpora Satpol PP

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	c) Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama d) Frekuensi dialog antarumat beragama * e) Jumlah kerjasama antarumat beragama * f) Jumlah dialog wawasan kebangsaan * g) Rasio tempat ibadah agama dan kepercayaan dengan jumlah penduduk: (1) Masjid/Mushola (2) Gereja (3) Pura (4) Vihara (5) Klenteng (6) Sanggar Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)	1 1 1 1 1:450 1:185 1:337 1:300 1:294 1:100/ 7 HPK	d. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; g. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; h. Program Pendidikan Politik Masyarakat;	Satpol PP Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol
KEMISKINAN	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA a) Jumlah BPD yang menginisiasi Perdes b) Jumlah PKK desa/kelurahan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK c) Strata Posyandu (Jumlah Posyandu 1.517):	40 208	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;	Dispermasdes Dispermasdes Dispermasdes

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	(1) Pratama	12	e. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan	Dispermasdes
	(2) Madya	324	f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Disarpus
	(3) Purna	846		
	(4) Mandiri	335		
	d) Jumlah Pos Kesehatan Desa yang memenuhi SPM (Misal: Peralatan, Bidan)	287		
	e) Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan (Jumlah BKM: 116):			
	(1) Mandiri	23		
	(2) Berdaya	87		
	(3) Madani	6		
	f) Jumlah Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (13 UPK):			
	(1) UPK surplus	13		
	(2) UPK belum surplus	-		
	g) Peringkat desa Kab. Tegal dalam lomba desa Tingkat Prov. Jateng	Juara. 3		
	h) Jumlah KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat	216		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	Desa) yang terlatih			
	i) Jumlah RTLH yang terpugar berdasar PPLS 2011 (27.013 RTLH kategori: lantai tanah/bambu, dinding kayu/bambu, tidak ada tempat BAB. Total PPLS: 116.073 RT)	6.419		
	j) Jumlah kelompok keluarga mitra dalam P2MBG	24		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
KEMISKINAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
	a) Tipologi Desa		a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;	Dispermasdes
	(1) Swadaya	31	b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;	Dispermasdes
	(2) Swakarya	115	c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;	Dispermasdes
	(3) Swasembada	135	e. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan	Dispermasdes
	b) Terbangunnya jalan tembus desa/poros desa oleh TNI-Masyarakat	24	f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Disarpus
	c) Jumlah desa yang mengisi data Profil Desa dan Data Dasar Keluarga (DDK)			
	(1) Data terisi 0-50%	0		
	(2) Data terisi 51-80	10		
	(3) Data terisi 81-100%	277		
	d) Rasio sarana pendidikan di desa			
	(1) PAUD	2		
	(2) SD/MI	3		
	(3) MDA	1		
e) Rasio Posyandu per Balita	1:75			
f) Rasio Akseptor KB	97,10			

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung jawab
	Indikator	Target Kinerja		
	g) Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	7.920		
	h) Jumlah mobil layanan perpustakaan keliling	2		
	i) Jumlah lokasi layanan perpustakaan silang terpadu	6		
	j) Persentase BP-SPAM yang memakai meter air	100		

Keterangan :

semua target bersifat kumulatif 2015-2019

* target diukur tahun berkenaan

